


**RENSTRA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen yang memuat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo secara spesifik merupakan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan arah kebijakan yang dijelaskan dalam Renstra ini, maka diperlukan strategi yang dituangkan dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan dalam kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung keberhasilan program. Melalui dokumen Renstra ini, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat memperoleh pedoman dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ingin dicapai selama periode tahun 2021-2026.

Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 17 September 2021
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**



Drs. ACHMAD ZAINI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640131 199103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	9
2.1.2 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	41
4.1.1 Tujuan	41
4.1.2 Sasaran	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	161
BAB VIII PENUTUP	162

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Uraian SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021...	16
Tabel 2.2 Aset yang Dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.....	18
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	20
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	24
Tabel 3.1 Analisis Lingkungan Internal.....	37
Tabel 3.2 Analisis Lingkungan Eksternal	38
Tabel 3.3 Pemetaan Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal.....	39
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	42
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	44
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	53
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah	2
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	15

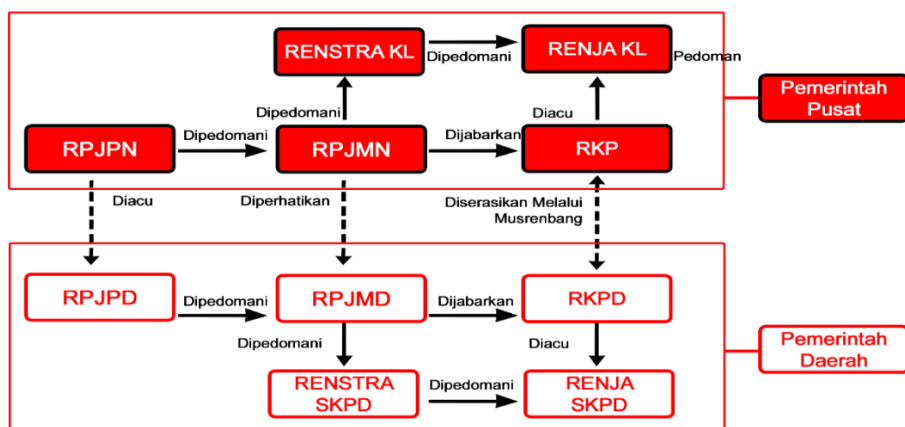
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan Strategis (Renstra) juga merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Permasalahan yang muncul merupakan konsekuensi dari proses pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh kepala daerah. Pada unit kerja atau Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan daerah 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan mandate dari RPJMD daerah yang terpilih. Gambar di bawah merupakan hubungan antar dokumen perencanaan di daerah.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Melalui perencanaan strategis yang baik, instansi pemerintah lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 sudah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra dimulai dari persiapan penyusunan Renstra, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang di dalamnya mencakup sebagai berikut :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD;

6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf F serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

Setelah tahapan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, maka disempurnakan dengan tahap berikutnya yakni Penyusunan Rancangan Renstra yang dikumpulkan di Bappeda Kabupaten Sidoarjo untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan sebagai penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. Hasil dari verifikasi Rancangan Awal Renstra kemudian disempurnakan menjadi Perumusan Rancangan Akhir Renstra, yang kemudian ditetapkan menjadi Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Sidoarjo atau dengan kata lain sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 ini menggunakan landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
- o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 -2021;

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; dan
- t. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor : 050/4319/438.6.1/2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan arah tujuan organisasi sesuai dengan sasaran yang diprioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok sehingga seluruh komponen yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi dapat memahami secara utuh arah dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu juga sebagai kendali dalam menentukan kebijakan dan program prioritas sehingga pelaksanaan penyelenggara tugas-tugas dapat berjalan secara baik. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi pembangunan Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya;
2. Menjamin komitmen seluruh pelaksana untuk berperan sesuai dengan kewenangan;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Sekretariat Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan Kabupaten Sidoarjo; dan

4. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan pertanggungjawaban.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 tersusun sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra PD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, dan keterkaitan Renja, RKT dengan Renstra.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

2.1.2 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

4.1.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan memuat visi dan misi RPJMD periode berkenaan, tujuan dan sasaran, serta rumusan mengenai pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai salah satu unsur pembantu Bupati Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

A. Tugas

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

B. Sekretariat Daerah di samping bertugas membantu Bupati dalam dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif juga mempunyai fungsi.

Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.
2. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama yang terdiri dari: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (pada urusan bidang kepemudaan dan olahraga); Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; dan Kecamatan;
 - Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama;
 - Pelaksanaan verifikasi rumusan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama;

- Pengoordinasian hasil evaluasi terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama;
- Pelaporan evaluasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, serta Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan BUMD;
 - Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa;

- Pelaksanaan verifikasi rumusan kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengoordinasian hasil evaluasi terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan factor yang mempengaruhi pencapaiantujuan kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pelaporan evaluasi di bidang di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Asisten Administrasi Umum

1. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Perencanaan dan Keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan yang terdiri dari: Sekretariat

Daerah;Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah; Badan Pelayanan Pajak Daerah; Sekretariat DPRD; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Komunikasi dan Informatika;

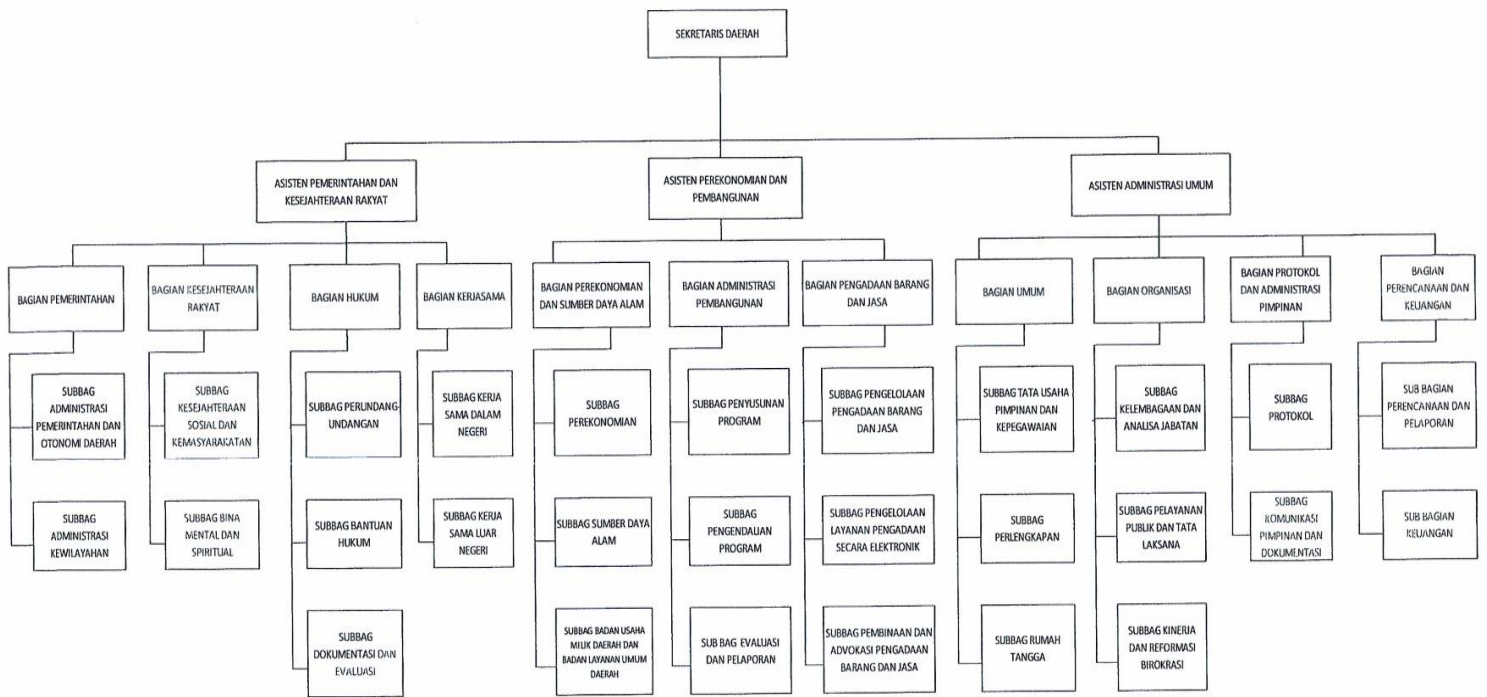
- Pelaksanaan verifikasi rumusan kebijakan di bidang Umum, Organisasi,Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Organisasi,Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum, Organisasi,Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- Pengoordinasian hasil evaluasi terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Umum, Organisasi,Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- Pelaporan evaluasi di bidang Umum, Organisasi,Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Umum, Organisasi,Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibagi dalam susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
 - Sub Bagian Administrasi Kewilayahan.

2. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
 - Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual.
 4. Bagian Kerjasama, terdiri dari:
 - Sub Bagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan
 - Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perekonomian;
 - Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
 - Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Penyusunan Program;
 - Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - Sub Bagian Rumah Tangga.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Protokol; dan
 - Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Keuangan.
- e. Kelompok jabatan fungsional



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pada saat proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026 kondisi *existing* untuk Struktur Organisasi masih mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2020 dan ada perubahan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019.

Kondisi saat ini dikarenakan belum adanya penetapan pejabat definitif sebagaimana dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021, sehingga pelaksanaan tugas tahun 2021 masih mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016. Untuk sinergi dalam mencapai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo terdapat Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah nomor 060/857/438.1.3.1/2021 tanggal 9 Pebruari 2021 untuk pembagian tugas sebagaimana dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2020, sampai adanya penetapan pejabat definitif sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021, dan akan diadakan penyesuaian peran dalam pembagian tuags sesuai dengan kondisi *existing* selanjutnya.

Penguatan fungsi kerjasama saat ini berada di Subbag Kerjasama Bagian Pemerintahan dengan peran optimalisasi kerjasama pemerintah maupun kerjasama non pemerintah namun dengan konsep penguatan pada Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dan optimasiasi kerjasama daerah satu

pintu maka kedepan akan dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama dengan pada subbag kerjasama luar negeri dan subbag Kerjasama dalam negeri serta evaluasi dan pengendalian kerjasama.

Kondisi saat ini pelaksanaan perencanaan dan keuangan berada di bawah Bagian Umum, untuk optimalisasi pengelolaan keuangan dan perencanaan akan dikuatkan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai unsur penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk ketepatan perencanaan pelaporan kinerja serta optimalisasi pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan perlengkapan saat ini masih terpisah antara Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Bupati, Wakil Bupati dan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh dua Bagian yaitu Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga. Untuk optimalisasi ke depan, capaian kinerja akan dilaksanakan oleh Bagian Umum selaku penanggung jawab kegiatan rumah tangga dan perlengkapan dengan memberikan layanan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Ditinjau dari jenis kelamin, rentang usia, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan aparatur serta pangkat/golongan ruang, maka kondisi aparatur dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Uraian SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Berdasarkan Jenis Kelamin	172 orang
	- Laki-Laki	104 orang
	- Perempuan	68 orang
2.	Berdasarkan Usia	172 orang
	- 20-30 tahun	25 orang
	- 31-40 tahun	45 orang
	- 41-50 tahun	56 orang
	- 51-60 tahun	46 orang
3.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	172 orang

	- S3	1 orang
	- S2	27 orang
	- S1/D-IV	77 orang
	- D-III	19 orang
	- D-II	-
	- D-I	-
	- SLTA	46 orang
	- SLTP	2 orang
	- SD	-
4.	Berdasarkan Diklat PIM	37 orang
	- Pendidikan Pimpinan IV	22 orang
	- Pendidikan Pimpinan III	12 orang
	- Pendidikan Pimpinan II	3 orang
5.	Berdasarkan Eselon	37 orang
	- Eselon IV	22 orang
	- Eselon III	9 orang
	- Eselon II	6 orang
6.	Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	172 orang
	- IV/d	1 orang
	- IV/c	5 orang
	- IV/b	4 orang
	- IV/a	2 orang
	- III/d	24 orang
	- III/c	27 orang
	- III/b	28 orang
	- III/a	26 orang
	- II/d	23 orang
	- II/c	19 orang
	- II/b	11 orang
	- II/a	-
	- I/d	-
	- I/c	2 orang
	- I/b	-
	- I/a	-

Sumber Data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Data Sumber Daya Manusia yang dihimpun dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo per Semester I Tahun 2021, dengan total SDM ASN sebanyak 172 orang. Selain ketersediaan SDM yang cukup, untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah diupayakan pengadaan prasarana dan sarana dengan aset yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.2 Aset yang Dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	JENIS KIB	JUMLAH ASET (Rp)	KETERANGAN
1	KIB A (Tanah)	54.852.000.000	Meliputi pendopo, kantor setda, villa tretes, rumah tamu, rumah dinas
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	42.072.968.534,36	Meliputi alat besar, alat angkut, alat bengkel dan ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran dan kesehatan, komputer
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	22.419.794.773	Meliputi gedung kantor Setda, pendopo, rumah tamu, rumah dinas, jalur difabel, villa tretes, pilar batas desa / kecamatan / daerah, tugu peringatan
4	KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	1.169.381.030	Meliputi jaringan instalasi air, listrik, telepon, pabx
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	128.999.850	Meliputi bahan perpustakaan (buku PUU), bahan bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga
TOTAL		120.643.144.187,36	

Sumber Data: Data KIB Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Data aset dihimpun dari data KIB A sampai KIB E Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo per Semester I Tahun 2021, dengan total keseluruhan mencapai Rp 120.643.144.187,36. Untuk kondisi sarana dan prasarana secara umum dalam kondisi masih layak pakai, kecuali untuk Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo diperlukan pelaksanaan rehabilitasi total dikarenakan kondisi bangunan gedung yang sudah tua.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai LPPD	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	Sangat Tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Nilai Sakip	A			A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase policy brief yang digunakan dalam perumusan kebijakan bupati	100%			100%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Nilai SKM	95			95	N/A	N/A	N/A	N/A	78,2	N/A	N/A	N/A	N/A	85,32%	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Kesepakatan bersama kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama	100%			100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Indeks Pemerintahan yang baik	100%			90%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Persentase policy brief yang digunakan dalam	100%			N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

	perumusan kebijakan daerah																		
8	Persentase produk hukum daerah yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%			N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
9	Persentase capaian indikator kinerja daerah yang memenuhi target	100%			N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
10	Nilai PMPRB	75			N/A	75	N/A	N/A	N/A	N/A	62,93	N/A	N/A	N/A	N/A	83,91%	N/A	N/A	N/A
11	Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo	78,5			N/A	78,5	N/A	N/A	N/A	N/A	79,49	N/A	N/A	N/A	N/A	101,16%	N/A	N/A	N/A
12	Persentase implementasi produk hukum daerah	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
13	Persentase Implementasi Kebijakan daerah untuk:																		
	a. Bidang Pemerintahan	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%

	b. Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	c. Bidang Perekonomian	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	d. Bidang Pembangunan	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	e. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	f. Bidang Organisasi	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
14	Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang mencapai target	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	63,33%	78,79%	63,64%	N/A	N/A	63,33%	78,79%	63,64%
15	Persentase OPD Pelayanan Publik dengan Nilai SKM minimal berkategori Baik	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
16	Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	75			N/A	N/A	75	75	75	N/A	N/A	84	86,28	86,98	N/A	N/A	112%	115,04%	115,97%
17	Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah	75			N/A	N/A	75	75	75	N/A	N/A	87,5	85	85	N/A	N/A	116,67%	113,33%	113,33%

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 mengalami perubahan indikator sasaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018 dikarenakan adanya penyesuaian dengan perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 serta peningkatan akuntabilitas kinerja sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Indikator yang digunakan pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, yaitu :

1. Persentase implementasi produk hukum daerah;
2. Persentase implementasi kebijakan daerah untuk Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan, Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Bidang Organisasi;
3. Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang mencapai target;
4. Persentase OPD pelayanan publik dengan Nilai SKM minimal berkategori baik;
5. Nilai SKM pelayanan Sekretariat Daerah; dan
6. Nilai SKM pelayanan kepada Pimpinan Daerah.

Sebagian besar kinerja pelayanan telah mencapai dari target yang ditetapkan. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah komitmen dari semua *stakeholder* Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta evaluasi internal yang dilakukan secara berkala untuk memastikan target kinerja dapat tercapai.

Sedangkan kinerja pelayanan yang belum memenuhi target adalah Persentase IKU OPD yang mencapai target, dimana faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target, yaitu :

- Masih belum optimalnya fungsi koordinasi dalam pemantauan progres kinerja PD;
- Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target IKU PD masih belum sepenuhnya dicarikan solusinya.

Tabel di bawah ini menunjukkan anggaran dan realisasi selama periode 5 (lima) tahun 2016-2021, rasio antara realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi :

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo pada:																	
a. Bagian Hukum	2.218.115.000	1.500.000.000	1.526.466.900	2.013.643.010	1.126.938.660	1.970.374.724	1.307.820.930	1.194.969.568	1.732.578.109	883.322.550	88,83%	87,19%	78,28%	86,04%	78,38%	1.677.032.714	1.417.813.176
b. Bagian Pemerintahan	2.366.416.900	1.403.138.075	4.972.396.079	4.840.447.000	1.972.143.386	2.071.496.540	1.120.187.271	3.114.780.944	2.559.742.033	1.825.756.271	87,54%	79,83%	62,64%	52,88%	92,58%	3.110.908.288	2.138.392.612

c. Bagian Kerjasama	2.670.490.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.623.190.118	N/A	N/A	N/A	N/A	98,23%	N/A	N/A	N/A	N/A	2.670.490.000	2.623.190.118
d. Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.158.538.643	3.571.516.100	6.968.216.569	8.858.253.248	9.776.601.570	3.788.315.560	3.447.172.090	6.484.012.394	8.402.540.031	7.934.210.359	91,10%	96,52%	93,05%	94,86%	81,16%	6.666.625.226	6.011.250.087
e. Bagian Perekonomian	2.024.549.800	1.452.500.000	1.109.545.000	1.351.895.480	866.647.090	1.550.561.041	1.090.160.393	960.943.275	1.164.298.589	701.798.857	76,59%	75,05%	86,61%	86,12%	80,98%	1.361.027.474	1.093.552.431
f. Bagian Pembangunan	2.083.765.000	1.635.675.000	1.317.955.837	1.348.907.570	1.268.766.145	1.867.085.107	1.513.894.715	1.290.587.565	1.295.782.103	1.248.906.996	89,60%	92,55%	97,92%	96,06%	98,43%	1.531.013.910	1.443.251.297
g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	1.715.275.600	3.829.628.797	4.637.505.785	2.575.185.304	N/A	1.519.181.557	3.092.893.140	3.836.286.614	2.129.806.091	N/A	88,57%	80,76%	82,72%	82,70%	3.189.398.872	2.644.541.851

h. Bagian Telematika	5.021.702.140	N/A	N/A	N/A	N/A	4.882.394.260	N/A	N/A	N/A	N/A	97,2 3%	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	5.021.702.140	4.882.394.260
i. Bagian Organisasi	1.612.000.000	2.446.425.000	1.111.650.000	1.985.078.280	776.852.080	1.365.150.174	2.146.678.851	1.024.898.669	1.684.298.828	689.612.501	84,6 9%	87, 75 %	92, 20 %	84, 85 %	88, 77 %	1.586.401.072	1.382.127.805
j. Bagian Umum	15.695.841.978	20.039.952.775	13.308.650.065	15.013.304.237	12.645.660.184	14.617.446.095	15.605.084.990	10.275.262.889	12.642.165.798	9.928.751.611	93,1 3%	77, 87 %	77, 21 %	84, 21 %	78, 52 %	15.340.681.848	12.613.742.277
k. Bagian Protokol dan Rumah Tangga	4.100.590.000	2.488.116.000	9.287.883.972	12.754.708.490	10.532.813.880	3.903.046.619	2.375.614.892	8.176.771.208	11.125.834.229	8.100.124.776	95,1 8%	95, 48 %	88, 04 %	87, 23 %	76, 90 %	7.832.822.468	6.736.278.345

Realisasi anggaran yang terbesar ada pada tahun 2016 yaitu 92,10% sedangkan yang terendah pada tahun 2020 sebesar 80,50%. Hal ini menunjukkan dari tahun ke tahun realisasi anggaran semakin menurun dan SILPA semakin tinggi.

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pendanaan pelayanan adalah prosedur / mekanisme pelaksanaan yang kurang efektif. Dalam hal ini telah dilakukan tindak lanjut dengan upaya – upaya peningkatan pelayanan di semua bagian.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dimana dalam konsep *New Public Management (NPM)*, birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang idealnya dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (result) dibandingkan dengan sekedar control terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ada. Dari hasil telaahan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dan hasil analisis terhadap pembelanjaan anggaran dapat berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun. Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang dan tantangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- Hasil analisis terhadap Renstra Setda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil analisa terhadap Renstra Setda Propinsi Jawa Timur bahwa dalam percepatan terwujudnya kinerja pelayanan sekretariat daerah, maka terdapat hal – hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan strategis sekretariat daerah untuk lima tahun kedepan, yaitu antara lain :

1. Evaluasi peningkatan pelayanan administrasi yang berkualitas melalui kebijakan di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja,

- transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Menciptakan kebijakan perekonomian yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, utama sektor informal dan usaha mikro;
 3. Penguatan sinergi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
 4. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat;
 5. Evaluasi tidak hanya pada realisasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan, namun juga mengevaluasi APBD secara keseluruhan, seperti dana transfer, hibah bansos, dan bantuan keuangan khusus;
 6. Peningkatan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa yaitu membuat proses pengadaan barang dan jasa dapat sepenuhnya dilakukan secara digital.
 7. Belum maksimalnya sistem akuntabilitas kinerja bagi aparatur
 8. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan Profesionalitas
 9. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
 10. Masih belum mandiri SDM
 11. Peningkatan pelayanan administrasi yang berkualitas melalui kebijakan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi kewilayahan dan kerjasama

Melihat hal tersebut di atas bisa, tantangan dan peluang yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, antara lain :

1. Penggalian atau analisa pada potensi perumusan kebijakan pada pengelolaan fasilitasi dibidang mental kerohaian / spiritual , pendidikan, kepemudaan , pelayanan sosial dan kesehatan dimana tentunya diperlukan dukungan dana
2. Mengembangkan nilai tambah (added value) komoditas unggulan lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen;
4. Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis dan industri kreatif;
5. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuhkembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro;
6. Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistem ketahanan pangan daerah.
7. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lima tahun mendatang untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan APBD yang tentunya membutuhkan tambahan alokasi sumber daya.
8. Memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada penyedia/pengusaha untuk dapat menayangkan produk di katalog elektronik dan toko daring. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya penyedia/pengusaha yang masuk ke dalam katalog elektronik dan toko daring, maka dapat mendorong PD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik dan toko daring.
9. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja
10. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
11. Penggalian atau Analisa pada potensi perumusan kebijakan pada pengelolaan fasilitasi di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum dan kerja sama

- Hasil telaahan terhadap RTRW

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029, maka dengan percepatan pelaksanaan pembangunan akan mempercepat pula rencana pengembangan wilayah berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam lima tahu mendatang peluang program strategis yang akan diupayakan untuk dapat terwujud adalah pembangunan *Frontage Road* dan RSUD Wilayah Sidoarjo Barat. Termasuk pada percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada proyek – proyek strategis, serta pemanfaatan lahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

- Hasil analisis terhadap KLHS

Sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdapat pada dokumen KLHS Kabupaten Sidoarjo, bahwa indikator keberhasilannya ditekankan untuk memanfaatkan alokasi anggaran yang ada untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini menjadi tantangan dan peluang untuk mengupayakan agar alokasi anggaran yang ditetapkan dalam anggaran kas terealisasi tepat waktu, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, yang merupakan kinerja pelayanan dari Sekretariat Daerah sebagai koordinator Perangkat Daerah.

Bab III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diidentifikasi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu permasalahan pada perumusan kebijakan dan fungsi koordinasi. Pada tatanan kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya penerapan kebijakan daerah;
2. Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan rumusan kebijakan (sektoral);
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
4. Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah; dan
5. Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat daerah yang menjadi *Role Model*.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kabupaten Sidoarjo dengan Bupati terpilih yang menjabat saat ini menetapkan visi pembangunan (5) lima tahun kedepan dengan bunyi **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**. Visi ini didukung oleh (5) lima misi untuk mewujudkannya. Adapun misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Membangun infrasktruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;

4. Membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya; dan
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Sebagaimana RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mendukung Misi 1, Tujuan 1, serta Sasaran 1 dan Sasaran 2 dengan telaahan sebagai berikut :

Misi 1 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha

Tujuan 1:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha

Indikator tujuan:

Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 1	Indikator Sasaran 1
1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital	1. Nilai SAKIP Kabupaten
	2. Status Kinerja LPPD
Sasaran 2	Indikator Sasaran 2
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan rangka mendukung kemudahan berusaha	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, terdapat 3 (tiga) program yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan, maka disusun 17 (tujuh belas) Program Strategis yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026, yaitu :

1. 100.000 lapangan kerja baru;
2. BPJS Kesehatan gratis seluruh warga;
3. Gratis makanan tiap hari warga miskin;
4. 10.000 beasiswa kuliah;
5. Insentif plus guru ngaji dan guru agama;
6. 5.000.000-50.000.000 modal usaha mikro perempuan;
7. 6.000.000 operasional bagi RT;
8. 20.000 UMKM naik kelas;
9. Penataan kota dan transportasi terpadu urai kemacetan;
10. Tingkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan dan kader posyandu;
11. Tingkatkan kesejahteraan GTT, guru swasta, dan tenaga honorer;
12. *Youth Center*, bangun pusat kreativitas anak muda;
13. 2.000 warung rakyat direnovasi;
14. Tingkatkan ADD untuk desa sejahtera;
15. 24 jam pengaduan rakyat respon cepat;
16. Reformasi perijinan untuk bisnis yang kondusif; dan
17. Perluasan RTH, revitalisasi sungai, revolusi manajemen sampah.

Dari 17 (tujuh belas) Program Prioritas tersebut diturunkan dalam Program Prioritas Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Program Prioritas ke 4 (empat) dan ke 15 (lima belas), yaitu :

1. Program Prioritas ke 4 (empat) : 10.000 beasiswa kuliah
Program Prioritas ini dilaksanakan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat.

2. Program Prioritas ke 15 (lima belas) : 24 jam pengaduan rakyat respon cepat
Program Prioritas ini dilaksanakan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yakni Bagian Pemerintahan.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Telaah pada renstra provinsi dilakukan untuk mengakomodir berbagai agenda pembangunan yang memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu untuk melihat beberapa hal yang mungkin akan menghambat pembangunan di kabupaten atau kota yang berhubungan dengan Tupoksi Sekretariat daerah. Merujuk pada SOTK Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa kewenangan yang memiliki sasaran maupun kebijakan yang bersentuhan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

1. Penggalan atau analisa pada potensi perumusan kebijakan pada pengelolaan fasilitasi dibidang mental kerohaian / spiritual , pendidikan, kepemudaan , pelayanan sosial dan kesehatan dimana tentunya diperlukan dukungan dana
2. Mengembangkan nilai tambah (*added value*) komoditas unggulan lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis *on line* yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen;
4. Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui *start up* bisnis dan industri kreatif;
5. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuhkembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro;
6. Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistem ketahanan pangan daerah.
7. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lima tahun mendatang untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan APBD yang tentunya membutuhkan tambahan alokasi sumber daya.

8. Memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada penyedia/pengusaha untuk dapat menayangkan produk di katalog elektronik dan toko daring. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya penyedia/pengusaha yang masuk ke dalam katalog elektronik dan toko daring, maka dapat mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik dan toko daring.
9. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja
10. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
11. Penggalan atau Analisa pada potensi perumusan kebijakan pada pengelolaan fasilitasi di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum dan kerja sama

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Srategis

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan hasil telaahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi peluang kinerja Sekretariat Daerah pada lima tahun mendatang akan mempercepat pula rencana pengembangan wilayah berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam lima tahu mendatang peluang program strategis yang akan diupayakan untuk dapat terwujud adalah pembangunan Frontage Road dan RSUD Wilayah Sidoarjo Barat. Termasuk pada percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada proyek – proyek strategis, serta pemanfaatan lahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Sedangkan hasil telaahan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bahwa Sekretariat Daerah sebagai koordinator Perangkat Daerah perlu menyusun kebijakan untuk memanfaatkan alokasi anggaran yang ada pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini dilakukan dengan mengupayakan agar alokasi anggaran yang

ditetapkan dalam anggaran kas terealisasi tepat waktu, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Sidoarjo disusun untuk pembenahan dan peningkatan kinerja.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka dilakukan analisis masalah, dimana Metode yang dipakai dalam menganalisis adalah dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities and Threats*) yang diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis Lingkungan Internal Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam melaksanakan tugas di bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Analisis Lingkungan Internal

KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur 3. Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan 4. Dukungan prasarana dan sarana yang memadai	1. Kurang optimalnya penerapan kebijakan daerah 2. Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan rumusan kebijakan (sektoral) 3. Nilai Sakip Perangkat Daerah 4. Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah 5. Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat daerah yang menjadi <i>Role Model</i>

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Sedangkan Analisis Lingkungan eksternal terdiri dari Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Analisis Lingkungan Eksternal

PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)	ANCAMAN (<i>THREAT</i>)
(1) Pengoptimalan penerapan kebijakan Daerah (2) Mewujudkan fungsi koordinasi penyusunan rumusan kebijakan (3) Peningkatan Nilai Sakip Perangkat Daerah (4) Peningkatan Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah (5) Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat daerah yang menjadi <i>Role Model</i>	(1) Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang profesional (2) Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas . (3) Pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas (4) PD tidak tertib dan komitmen dalam mewujudkan target kerjanya

Berdasarkan analisis Lingkungan eksternal dan analisis Lingkungan internal di atas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*), maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

a. Strategi SO

Daya gunakan kekuatan, manfaatkan peluang.

b. Strategi ST

Daya gunakan Kekuatan, Hindari Ancaman.

c. Strategi WO

Atasi kelemahan, manfaatkan peluang.

d. Strategi WT

Meminimalkan kelemahan, hindari ancaman.

Sebagai hasil interaksi atau pemetaan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, dituangkan ke dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pemetaan Analisis Lingkungan
Eksternal dan Internal

ALI ALE	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	(1) Tugas pokok dan fungsi yang jelas (2) Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur (3) Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan (4) Dukungan prasarana dan sarana yang memadai	(1) Kurang optimalnya penerapan kebijakan daerah (2) Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan rumusan kebijakan (sektoral). (3) Nilai Sakip Perangkat Daerah (4) Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah (5) Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat daerah yang menjadi <i>Role Model</i>
PELUANG (O)	(S) + (O)	(W) + (O)
(1) Pengoptimalan penerapan kebijakan Daerah (2) Mewujudkan fungsi koordinasi penyusunan rumusan kebijakan (3) Peningkatan Nilai Sakip Perangkat Daerah (4) Peningkatan Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah (5) Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat daerah yang menjadi <i>Role Model</i>	Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas, mengoptimalkan Sumber Daya aparatur, adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja Aparatur PNS serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai demi mengoptimalkan Kebijakan daerah, mewujudkan fungsi koordinasi penyusunan rumusan kebijakan, meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah, Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah dan peningkatan Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat daerah yang menjadi <i>Role Model</i> (S1,2,3,4 – O1,2,3,4,5)	1. Mengoptimalkan penerapan kebijakan Daerah (W1– O1). 2. Mewujudkan fungsi koordinasi penyusunan rumusan kebijakan 3. Meningkatkan Nilai Sakip Perangkat Daerah 4. Meningkatkan Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah 5. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat daerah yang menjadi <i>Role Model</i>
ANCAMAN (T)	(S) + (T)	(W) + (T)
(1) Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang profesional (2) Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas . (3) Pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas (4) PD tidak tertib dan komitmen dalam mewujudkan target kinerjanya	1. Mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas (S1, - T2) 2. Mendayagunakan SDM aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah (S2,3 – T1)	1. Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar PD untuk pengoptimalan penerapan kebijakan dan fungsi koordinasi penyusunan rumusan kebijakan (W1,2 – T4) 2. Meningkatkan kinerja dan koordinasi untuk peningkatan Nilai SAKIP, LPPD dan IPP (W3,4,5 – T4)

Adapun Isu Strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Kurang optimalnya penerapan kebijakan daerah;
2. Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan rumusan kebijakan (sektoral);
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
4. Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah; dan
5. Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat daerah yang menjadi *Role Model*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Rencana Strategis mengacu visi dan misi kepala daerah yang terpilih, untuk menyelaraskan maka perlu menerjemahkan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah. Maka sesuai dengan Tupoksi Sekretariat Daerah berikut Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diakomodir oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”

Penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berfungsi memfasilitasi perumusan kebijakan. Sekretariat Daerah memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan Sekretariat Daerah di masa yang akan datang. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah wajib mendukung visi dan misi Bupati Sidoarjo yang dijabarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Sekretariat Daerah harus mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Berikut tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

4.1.2 Sasaran

Setelah menetapkan tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Sekretariat Daerah menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:

“Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah”

Untuk memperoleh sasaran yang dapat dicapai maka ditentukan suatu indikator kinerja. Indikator kinerja disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja direncanakan dalam periode lima tahun. Tabel pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah sampai indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disusun dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo

No	Visi	Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Status Kinerja LPPD	ST (4,00)	ST (4,21)	ST (4,3)	ST (4,4)	ST (4,45)	ST (4,5)	
				2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A- 4,3	A- 4,32	A- 4,35	A- 4,4	A- 4,45	A- 4,49	
				3. Nilai SAKIP	A (80,1)	A (80,5)	A (81)	A (81,5)	A (85)	AA (90,01)	

Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	1. Indeks Kualitas Kebijakan	NA	70	72	75	77	80
	2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	50%	75%	77%	78%	80%	100%
	3. Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	66%	66%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rincian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Visi	Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan		
Misi I	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Penguatan penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Penyusunan Kebijakan daerah yang implementatif dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan SPM - Meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah - Meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - Meningkatkan capaian kinerja urusan dukcapil, kesbangpol, trantibum, pemdes 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki IKK oleh masing-masing perangkat daerah terkait - Pemenuhan bukti dan pendukung IKK dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah - Penginputan IKK kedalam RPJMD - Penguatan Kapasitas masing masing perangkat daerah terkait penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatkan capaian kinerja lingkungan bersih, sehat, cerdas dan tahan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan koordinasi, sinkronisasi serta integrasi antar perangkat daerah dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah - Pembuatan Juklak/Tata Cara penyelenggaraan lomba lomba yang meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

			<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan sistem integrasi dan sinkronisasi sistem pelaporan - Pembuatan Website LPPD dan SPM
		Mempercepat tersusunnya kebijakan administrasi kewilayahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyusunan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan - Percepatan fasilitasi penyelesaian batas desa/kecamatan dan wilayah
		Mewujudkan kecamatan dan kelurahan berkinerja baik	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyusunan laporan rupabumi di Kabupaten Sidoarjo - Percepatan penetapan batas wilayah di Kab Sidoarjo - Percepatan pemenuhan IKK, nilai saki dan pelayanan publik bagi kecamatan dan kelurahan
		Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kerjasama daerah dengan daerah lain, daerah dengan pihak ke 3, daerah dengan luar negeri, daerah dengan Lembaga luar negeri - Melakukan Pengalihan data potensi Kerjasama - Melakukan inisiasi Kerjasama dengan wilayah perbatasan - Melakukan sosialisasi tata cara Kerjasama daerah kepada Perangkat daerah - Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka inisiasi dan evaluasi Kerjasama - Melakukan asistensi penyusunan naskah Kerjasama - Meningkatkan koordinasi inisiasi Kerjasama - Mengoptimalkan pemanfaatan laporan hasil Kerjasama sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kerjasama

		<p>Mendorong langkah percepatan pencapaian target Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, SPM dan penyelenggaraan pemerintahan umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan integrasi antar perangkat daerah - Mengoptimalkan percepatan pemenuhan data dukung IKK - Mempercepat pelaksanaan seluruh hasil rekomendasi oleh tim evaluator oleh perangkat daerah - Meningkatkan intensitas pelaksanaan konsultasi kepada tim evaluasi - Menyusun tatacara pelaksanaan lomba lomba dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan - Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Umum
		<p>Mendorong langkah percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sesuai target dibidang administrasi kewilayahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan kewilayahan dengan seluruh pihak terkait - Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan di kecamatan dan kelurahan - Meningkatkan pelaksanaan monev kinerja kecamatan dan kelurahan - Meningkatkan pelaksanaan monev pelimpahan Sebagian kewenangan bupati kepada camat - Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat - Mempercepat penyelesaian penyusunan kebijakan kewilayahan,

			kecamatan dan kelurahan
		Mendorong langkah optimalisasi Kerjasama sesuai target dan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait pelaksanaan Kerjasama - Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, luar negeri dan Lembaga luar negeri
		Meningkatkan nilai-nilai spiritual masyarakat Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan prestasi Kafilah MTQ Kabupaten, Provinsi , dan Nasional
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan prestasi beasiswa bagi Mahasiswa, Santri, dan Hafizh-Hafizhah
		Fasilitasi kegiatan Bina Mental Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan CJH masyarakat Kab. Sidoarjo
			<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan kegiatan-kegiatan Mental Spiritual
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan hibah pada tempat ibadah dan lembaga keagamaan muslim dan non muslim
		Mendorong perumusan kebijakan Bina Mental Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Juknis Musababaqah Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan dan Kabupaten
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP alur permohonan bantuan tempat ibadah
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pedoman dan juknis seleksi Hafiz-Hafizha, pembina Qori, serta beasiswa bagi Mahasiswa dan Santri
		Mendorong langkah percepatan pelaksanaan kegiatan yang sesuai target di bidang kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi OPD terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyusunan perumusan kebijakan di Bidang Kesejahteraan sosial, Pendidikan, kebudayaan, kesehatan,

			tenaga kerja, kesejahteraan sosial, transmigrasi, pengendalian Penduduk dan P3AKB
			- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang di Bidang Kesejahteraan sosial, Pendidikan, kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, kesejahteraan sosial, transmigrasi, pengendalian Penduduk dan P3AKB
		Mendorong langkah percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sesuai target di bidang Kemasyarakatan	- Meningkatkan koordinasi OPD terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
			- Meningkatkan penyusunan perumusan kebijakan di Bidang kepemudaan dan olah raga
			- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang kepemudaan dan olah raga
		Penyusunan kebijakan daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, investasi, industri dan jasa	Optimalisasi penyusunan kebijakan (policy brief), koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang perdagangan, investasi, industri dan jasa
		Intensifikasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi tepat guna	Optimalisasi penyusunan kebijakan (policy brief), koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang pertanian dan perikanan serta sumber daya alam
		Kebijakan stimulus untuk mendorong berkembangnya koperasi dan usaha mikro	Optimalisasi penyusunan kebijakan (policy brief), koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha mikro dan inklusi keuangan
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMD dan BLUD, dan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan untuk mendorong	Optimalisasi penyusunan kebijakan (policy brief), koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang BUMD dan BLUD

		pengelolaan potensi daerah secara optimal	
		Kemitraan dengan perusahaan bidang ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan angkatan kerja lokal	Koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan
		Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas	Koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pembinaan wirausaha baru
		Integrasi program lintas urusan secara tepat sasaran melalui implementasi 17 Program Prioritas	Koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang mendukung implementasi 17 Program Prioritas
		Optimalisasi implementasi kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pembangunan	Penyusunan kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan aspek digitalisasi
		Mendorong langkah percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sesuai target	Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan secara berkala dengan memberikan penilaian progres
		Besaran nilai standart harga yang ditetapkan sesuai dengan batas kewajaran	Penyusunan standart harga yang menyesuaikan harga retail untuk menjadi acuan perencanaan belanja daerah
		Penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN secara bertahap	- Optimalisasi Kegiatan Bimbingan Teknis, sosialisasi dan pelatihan kepada OPD dan Desa
			- Mendorong pelaku pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
			- Meningkatkan intensitas layanan pendampingan dan konsultasi bagi pelaku pengadaan barang/jasa
		Penyusunan dan implementasi SOP secara konsekuen dan berkelanjutan	- Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SOP

			- Penerapan kebijakan penilaian kinerja penyedia untuk menunjang proses pengadaan barang/jasa sesuai SOP
		Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT)	- Mendorong OPD dalam mewujudkan digitalisasi pengadaan barang/jasa dengan menerbitkan aturan dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
			- Mendorong pemanfaatan toko daring dan katalog elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan bidang pelayanan publik - Fasilitasi penguatan Inovasi pelayanan publik bagi unit kerja - Penguatan ketatalaksanaan - Monitoring Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 	Mewujudkan pelayanan publik yang prima
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas kebijakan menunjang akuntabilitas kinerja - Membentuk tim Reformasi Birokrasi, tim SAKIP Kabupaten - Fasilitasi dan koordinasi Pengukuran Kinerja Kabupaten dan Perangkat Daerah - Fasilitasi dan koordinasi pengukuran capaian RB Kabupaten dan Perangkat Daerah - Pembinaan budaya kinerja organisasi - Pembinaan Zona integritas (WBK dan WBBM) 	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas kebijakan menunjang kelembagaan - Penataan kelembagaan sesuai dengan regulasi dan kondisi ideal untuk mencapai tujuan 	Organisasi/kelembagaan yang adaptif dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan

		<p>dalam melaksanakan urusan</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyusun analisa jabatan- Melaksanakan analisa beban kerja dan peta jabatan	
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate output) / Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9		10		11		12		13		14		15		16	17
Mewujudkan tata kelola pem	Meningkatnya kualitas kebijakan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan dan koordinasi	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	NA	NA	10.8 60.8 64.9 16	70	13.7 69.9 24.0 54	72	23.7 71.8 40.6 38	75	27.5 65.5 17.8 58	77	33.1 11.2 10.1 62	80	39.1 62.0 72.6 61	80	48.0 52.4 86.7 23		Setda Kab Sido

erintah yang baik	n daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas			nasi dibawah koordinasi Asisten Administrasi Pemerintahan dan kesra	Persentase Kinerja Urusan tercapai	100 %	100 %	911.578.149	100 %	1.778.824.893	100 %	10.056.917.614	100 %	10.206.917.614	100 %	10.356.917.614	100 %	10.506.917.614	100 %	10.506.917.614		arj o
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatkan Kualitas produk hukum daerah dalam rangka menjamin kepastian hukum	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	Rp 355.346.186	100 %	Rp 418.482.500	100 %	Rp 485.500.000	100 %	Rp 535.000.000	100 %	Rp 590.000.000	100 %	Rp 650.000.000	100 %	Rp 650.000.000	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo	

					Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Penyuluhan Hukum	1. Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100 %	100 %	Rp 1.315.606.150	100 %	Rp 920.600.000	100 %	Rp 1.115.248.138	100 %	Rp 1.285.035.358	100 %	Rp 1.481.040.662	100 %	Rp 1.707.196.761	100 %	Rp 7.824.727.069	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo
						2. Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi	100 %	100 %	Rp 40.688.850	100 %	Rp 45.000.000	100 %	Rp 50.000.000	100 %	Rp 55.000.000	100 %	Rp 60.000.000	100 %	Rp 65.000.000	100 %	Rp 315.688.850	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo
					Meningkatnya Kualitas Kajian dan Dokumentasi Hukum	1. Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan	100 %	100 %	Rp 343.726.568	100 %	Rp 430.375.000	100 %	Rp 451.893.750	100 %	Rp 473.412.500	100 %	Rp 494.931.250	100 %	Rp 529.361.250	100 %	Rp 529.361.250	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo

					Tersusunnya Raperbup untuk dilakukan penataan		Persentase penataan peraturan Bupati yang difasilitasi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo
					Tersusunnya Keputusan Bupati untuk dilakukan penataan		Persentase penataan keputusan bupati yang difasilitasi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo
					Tersusunnya Jawaban Eksekutif sebagai tindak lanjut Panda		Persentase Pandangan Umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo

				ngan Umum Fraksi- Fraksi DPRD		n jawaba n ekseku tif																	
		4.01 .02. 2.03 .02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlak sanana ya terfasil itasinya a proses penyel esaian perma salaha n Huku m Litigasi di setiap tingkat peradil an dan lemba ga lain yang dipers amaka n		Persen tase penyel esaian perma salaha n hukum Litigasi yang difasilit asi penyel esaian nya	100 %	100 %	Rp 1.35 6.29 5.00 0	100 %	Rp 965. 600. 000	100 %	Rp 1.16 5.24 8.13 8	100 %	Rp 1.34 0.03 5.35 8	100 %	Rp 1.54 1.04 0.66 2	100 %	Rp 1.77 2.19 6.76 1	100 %	Rp 2.03 8.02 6.27 5		Bag. Huk um setd a Kab upat en Sido arjo

					dengan penyelesaian sengketa di pengadilan																
					Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi meliputi konsultasi hukum, pendapat hukum, monev bantuan																
					Persentase Penyelesaian permasalahan hukum Non Litigasi yang difasilitasi penyelesaiannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
																					Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo

		4.01 .02. 2.03 .03		Pendoku mentasian Produk Hukum dan Pengelolan Informasi Hukum	Terlak sananya Pengk ajian/ evalua si Produ k Huku m Daera h sesuai denga n Peratu ran yang berlak u dan sosial masya rakat					Jumla h hasil produk hukum yang dilakuk an pengk ajian atau evalua si	5	5	Rp 458. 302. 091	5	Rp 727. 971. 084	5	Rp 534. 292. 500	5	Rp 86.3 22.5 00	5	Rp 585. 177. 500	5	Rp 625. 885. 500	5	Rp 2.81 3.94 0.50 0	Bag. Huk um setd a Kab upat en Sido arjo
--	--	-----------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---------------------------	---	---------------------------	---	---------------------------	---	--------------------------	---	---------------------------	---	---------------------------	---	---------------------------------	---

					Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum secara Manual dan Elektronik		Prosentase produk hukum yang didokumentasikan dan diformasikan (manual dan elektronik)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo
					Terlaksananya kegiatan Kadar-kum dan Pelaporan Aksi HAM		Prosentase terselesainya kegiatan kadar-kum dan fasilitasi pelaporan HAM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo

		4.01 .02. 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Optim alisasi kualita s penyu sunan kebijak an bidang Pemer intaha n		Indeks kualita s kebijak an daerah di bidang pemer intahan	NA	NA	Rp 361. 761. 640	70	Rp 732. 518. 198	72	Rp 8.02 5.60 9.85 0	75	Rp 8.12 5.60 9.85 0	77	Rp 8.22 5.60 9.85 0	80	Rp 8.32 5.60 9.85 0	80	Rp 8.32 5.60 9.85 0	Bag. Pemer intaha n Setda Kab upat en Sido arjo
				Optim alisasi Kinerja urusan Pemer intaha n		1. Persen tase PD denga n Nilai SAKIP A di bidang Pemer intahan (Dispe ndukc apil, Bakes bang, Satpol PP, BPBD, Kecam atan)	100 %	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	Bag. Pemer intaha n Setda Kab upat en Sido arjo

							2. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan	100 %	100 %	Rp 549.816.509	100 %	Rp 1.046.306.695	100 %	Rp 2.031.307.764	100 %	Rp 2.081.307.764	100 %	Rp 2.131.307.764	100 %	Rp 2.181.307.764	100 %	Rp 2.181.307.764	Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo
							3. Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dispendukapil)	A-	A-	Rp -	A-	Rp -	A-	Rp -	A-	Rp -	A-	Rp -	A-	Rp -	A-	Rp -	Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo
	4.01	.02.	2.01	.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan kinerja administrasi	Persentase PD yang telah dilakukan	NA	NA	Rp 74.704.813	100 %	Rp 37.965.609	100 %	Rp 2.400.000	100 %	Rp 2.500.000	100 %	Rp 2.600.000	100 %	Rp 2.700.000	100 %	Rp 2.700.000	Bag. Pemerintahan Setda Kab

				pemerintahan		monev administrasi pemerintahan dengan kategori Baik															upaten Sidoarjo	
4.01	.02.	2.01	.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatkan kemampuan kinerja penyelenggaraan SPM	Jumlah laporan capaian standar pelayanan minimal yang disusun (1 laporan)	ST	NA	Rp 287.056.827	ST	Rp 694.552.589	ST	Rp 5.625.609.850	ST	Rp 5.625.609.850	ST	Rp 5.625.609.850	ST	Rp 5.625.609.850	ST	Rp 5.625.609.850	Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo
					Meningkatkan kemampuan kinerja	Jumlah laporan penyel	ST (20183,549)	NA		ST (4,21)		ST (4,3)		ST (4,4)		ST (4,5)		ST (4,5)	100%		Bag. Pemerintahan Setda	

						WKDH yang ditindaklanjuti														upat en Sidoarjo
				Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum		1. Persentase PD yang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dimonev	NA	75 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo
						2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A (Dispendukcapil, BPBD, Bakes	NA	75 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo

							bang, Satpol PP)																
							3. Persen tase kinerja urusan tercapai (Dispe ndukc apil, BPBD, Satpol PP, Bakes bang)	NA	75 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en Sido arjo
							4. Nilai IPP PD role model di bidang pemer intahan denga	NA	baik		Baik		san gat baik		san gat baik		san gat baik		san gat baik		san gat baik		Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en

					n katego ri minim al A- (Dispe ndukc apil)																Sido arjo	
			4.01 .02. 2.01 .02	Pengelola an Administr asi Kewilayah an	Tersus unnya rumus an kebijak an bidang admini strasi kewila yahan																	Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en Sido arjo
								Rp 549. 816. 509		Rp 1.04 6.30 6.69 5,00		Rp 2.03 1.30 7.76 4,00		Rp 2.08 1.30 7.76 4,00		Rp 2.13 1.30 7.76 4,00		Rp 2.18 1.30 7.76 4,00		Rp 2.18 1.30 7.76 4,00		Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en
					1. Persen tase rumus an kebijak an admini strasi kewila yahan yang ditinda klanjuti	NA	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
					2. Persen tase kecam atan yang telah dinen tarisasi data gasetir	NA	100 %		5%	15 %	30 %	50 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

							/rupab umi unsur buatan															Sido arjo	
							3. Persen tase desa dan kelura han yang sudah dilakuk an penege asan batas desa dan kelura han secara yuridis (perbu p)	NA	100 %		5%		15 %		30 %		50 %		70 %		100 %		Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en Sido arjo
					Terwuj udnya Kecam atan		1. Persen tase Kecam atan	27 %	44 %		66 %		83 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bag. Pem erint aha n

					dan Kelurahan yang berkinerja baik		dengan Nilai SAKIP A														Setda Kabupaten Sidoarjo
							2. Persentase kinerja urusan kecamatan yang tercapai	16 %	50 %		66 %	83 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo
							3. Persentase kecamatan yang berhasil mengimplementasikan pelimpahan	16 %	50 %		66 %	83 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo

						naska h kerjas ama																	
		4.01 .02. 2.04 .02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Menin gkatya fasilita si kerjas ama luar negeri		Persen tase fasilita si kerjas ama luar negeri yang ditinda klanjuti ke dalam naska h kerjas ama	100 %	100 %	Rp 99.6 76.5 00	100 %	Rp 256. 391. 667	100 %	Rp 1.70 0.00 0.00 0	100 %	Rp 1.75 0.00 0.00 0	100 %	Rp 1.80 0.00 0.00 0	100 %	Rp 1.85 0.00 0.00 0	100 %	Rp 1.85 0.00 0.00 0		Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en Sido arjo
		4.01 .02. 2.04 .03	Evaluasi Pelaksan aan Kerja Sama	Terpe nuhiny a pelaks anaan Kerja Sama sesuai kesep akatan		Persen tase kerjas ama yang dievalu asi	100 %	100 %	Rp 28.0 21.0 00	100 %	Rp 57.2 25.0 00	100 %	Rp 100. 000. 000	100 %	Rp 150. 000. 000	100 %	Rp 200. 000. 000	100 %	Rp 250. 000. 000	100 %	Rp 250. 000. 000		Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en

				yang dituangkan dalam Naskah Kerjasama																	Sidoarjo	
	4.01	.02.	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	NA	NA	Rp 3.651.124.478	70	Rp 10.159.651.900	72	Rp 18.000.000	75	Rp 21.600.000	77	Rp 25.920.000	80	Rp 31.104.000	80	Rp 31.415.040.000	Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo
					kemasyarakatan yang diterapkan	2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas	100%	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo

						Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)																
						3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	100 %	100 %	Rp 4.53 3.55 4.57 0	100 %	Rp 765. 711. 875	100 %	Rp 1.33 6.80 0.00 0	100 %	Rp 1.60 4.16 0.00 0	100 %	Rp 1.92 4.99 2.00 0	100 %	Rp 2.30 9.99 0.40 0	100 %	Rp 2.33 3.09 0.30 4	Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo

						4. Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (RSUD)	A-	A-	Rp -	A-	Rp -	A-		A-		A-		A-			Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo	
4.01	.02.	2.02	.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tersusunnya kebijakan bina mental spritual dan sarana ibadah	Persen tase rumusan Kebijakan Bina Mental Spritual dan ibadah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Rp 3.651.124.478	100 %	Rp 10.159.651.900	100 %	Rp 18.000.000.00	100 %	Rp 21.600.000.00	100 %	Rp 25.920.000.00	100 %	Rp 31.104.000.00	100 %	31.415.040.00	Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo

					Terfasilitasinya pemberian rekomendasi pembangunan rumah ibadah		Persentase Rekomendasi pembangunan rumah ibadah yang difasilitasi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo
					Terfasilitasinya kegiatan keagamaan Pemkab Kab Sidoarjo		Persentase kegiatan keagamaan Pemkab Kab Sidoarjo yang difasilitasi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo
					Terpantauanya monev pembangunan		Persentase pembangunan Ruma	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Kesra Setda Kabupaten

				rumah ibadah		h ibadah yang telah dilakukan monev pelaksanaannya															en Sidoarjo	
4.01	.02.	2.02	.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas	NA	100 %	Rp 324.295.570	100 %	Rp 594.215.000	100 %	Rp 976.800.000	100 %	Rp 1.172.160.000	100 %	Rp 1.406.592.000	100 %	Rp 1.687.910.400	100 %	1.704.789.504	Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo

						Sosial, Disnaker, Dinas P3AK B, BPBD)																	
						2. Persen tase kinerja urusan tercapai di bidang Keseja hnteraan Sosial (Dinas Keseh atan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendid ikan, Dinas Sosial, Disnaker,	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					Bag. Kesra Setda Kab upaten Sido arjo

							Dinas P3AK B, BPBD)																		
							3. Nilai IPP PD role model di bidang kesejahteraan sosial dengan kategori minimal A- (RSUD)	NA	Baik		Baik		san gat baik		san gat baik		san gat baik		san gat baik		san gat baik		san gat baik		Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo

4.01	.02.	2.02	.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan masyarakat (Dispo rapar)	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Rp 4.209.259.000	Rp 171.496.875	Rp 360.000.000	Rp 432.000.000	Rp 518.400.000	Rp 622.080.000	628.300.800	Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo
						2. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan masyarakat (Dispo rapar)	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

				dibawah koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	NA	84	1.12 4.78 6.64 5	85	1.45 7.27 6.74 0	86	4.40 0.00 0.00 0	88	4.55 0.00 0.00 0	89	4.70 0.00 0.00 0	90	5.00 0.00 0.00 0	90	5.00 0.00 0.00 0		
4.01	.03.	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya kebijakan daerah di bidang perekonomian	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	NA	NA	530.970.017,00	70	621.514.552,00	72	621.514.552,00	75	621.514.552,00	77	621.514.552,00	80	621.514.552,00	80	621.514.552,00		Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo

						2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	NA	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo
						3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	NA	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo

					4. Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian (DPMPTSP)	A-	A-	Rp	A-	Rp	A-	Rp	A-	Rp	A	Rp	A-	Rp	A-	Rp	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo	
4.01	.03.	2.01	.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersusunnya dokumen kebijakan bidang BUMD dan BLUD																	Subag BUMD & BLUD Setda Kabupaten Sidoarjo
						2	2	Rp 132.520.017	2	287.485.287,00	2	287.485.287,00	2	287.485.287,00	2	287.485.287,00	2	287.485.287,00	2	287.485.287,00		

					Terlaksanaan kegiatan penatausahaan Bagian		Jumlah dokumen penatausahaan Bagian yang disusun	40 laporan	36 laporan		40 laporan		40 laporan		40 laporan		40 laporan		40 laporan		Sub ag BU MD & BLU D Setda Kabupaten Sidoarjo	
4.01	.03.	2.01	.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksanaan kegiatan pembeantasan BKC ilegal		Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	2 kali	2 kali	Rp 112.500.000	2 kali	25.000.000,00	2 kali	25.000.000,00	2 kali	25.000.000,00	2 kali	25.000.000,00	2 kali	25.000.000,00	25.000.000,00	Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo

4.01 .03. 2.01 .03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tersusunnya dokumen kebijakan bidang Perekonomian		Jumlah rumusan kebijakan bidang Perekonomian yang disusun	1 laporan	2 laporan	Rp 285.950.000	2 laporan	Rp 309.029.265	2 laporan	309.029.265,00	2 laporan	309.029.265,00	2 laporan	309.029.265,00	2 laporan	309.029.265,00	309.029.265,00	2 laporan	Sub ag Per eko nom ian Setd a Kab upat en Sido arjo		
					Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian yang dilaksanakan	1 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan				4 laporan	4 laporan	Sub ag Per eko nom ian Setd a Kab upat en Sido arjo
					1. Persentase kebijakan bidang Perekonomian	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				100 %	100 %	Sub ag Per eko nom ian Setd a Kab upat en Sido arjo

					3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sub ag Per eko nom ian Setd a Kab upat en Sido arjo
4.01 .03. 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya kebijakan daerah di bidang Sumber	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA	NA	NA	6.73 1.79 0.00 0,00	70	6.91 1.74 5.46 5,00	72	6.91 1.74 5.46 5,00	75	6.91 1.74 5.46 5,00	77	6.91 1.74 5.46 5,00	80	6.91 1.74 5.46 5,00	80	6.91 1.74 5.46 5,00		Bagi an Per eko nom ian dan SDA Setd a	

					Daya Alam dan ESDM																Kabupaten Sidoarjo	
					2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas LHK)	NA	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo
					3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas	NA	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kab

					Perikanan, Dinas LHK)															upat en Sido arjo	
4.01 .03. 2.04 .01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tersusunnya dokumen kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan		Jumlah rumusan kebijakan Ketahanan Pangan bidang Pertanian dan Perikanan yang disusun	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	6.58 5.80 0.00 0,00	Sub ag SDA Setda Kab upat en Sido arjo
			Terlaksananya koordinasi bidang Pertanian dan		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertanian dan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	6.58 5.80 0.00 0,00	Sub ag SDA Setda Kab upat en

					Perik nan		Perika nan yang dilaksa nakan														Sido arjo
					Terlak san an kebijak an bidang Pertani an dan Perika nan		1. Persen tase kebijak an bidang Pertani an dan Perika nan yang dilaksa nakan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sub ag SDA Setd a Kab upat en Sido arjo
							2. Persen tase PD denga n Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Panga n dan	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sub ag SDA Setd a Kab upat en Sido arjo

					anaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan														Sidoarjo
					Direkomendasikan ya temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita untuk mendapakan tindakan hukum		Persen temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk mendapakan tindak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo

					Terlaksanaan koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	NA	NA		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo
					Terlaksanaan kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Persentase kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	NA	NA		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo

						Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas LHK)	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo	
						Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas LHK)	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo	
		4.01 .03. 2.04 .03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersusunnya dokumen kebijakan bidang Energi dan Air		Jumlah rumusan kebijakan bidang Energi dan Air yang disusun	1 laporan	1 laporan	Rp 66.485.000	1 laporan	309.545.465,00	1 laporan	309.545.465,00	1 laporan	309.545.465,00	1 laporan	309.545.465,00	1 laporan	309.545.465,00	1 laporan	309.545.465,00	Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo

				Terlaksananya koordinasi bidang Energi dan Air	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo
				Terlaksananya kebijakan bidang Energi dan Air	Persentase kebijakan bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo
	4.01 .03. 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Optimalisasi kualitas penyusunan kebijakan bidang administrasi	Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan	NA	NA	Rp 233.962.000,00	70	Rp 323.112.000,00	72	Rp 1.200.000,00	75	Rp 1.250.000,00	77	Rp 1.300.000,00	80	Rp 1.400.000,00	80	Rp 1.400.000,00		Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab

					dan pengendalian pembangunan															upat en Sidoarjo		
					Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pembangunan	1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan (Dinas PUBMSD A, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda)	25 %	25 %	Rp -	25 %	Rp -	50 %	Rp -	50 %	Rp -	75 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo
						2. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan (Dinas PUBMSD A, Dinas	100 %	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab

						P2CKTR, Dishub, Bappeda)														upat en Sido arjo	
				Menin gkatny a kualita s penyu sunan dan pelaks anaan Progra m Peran gkat Daera h	1. Persenta se Program Perangka t Daerah yang sesuai dengan standaris asi (SSH, ASB, HSPK)	100 %	100 %	Rp 200. 000. 000, 00	100 %	Rp 200. 000. 000, 00	100 %	Rp 200. 000. 000, 00	100 %	Rp 200. 000. 000, 00	100 %	Rp 200. 000. 000, 00	100 %	Rp 200. 000. 000, 00	100 %	Rp 200. 000. 000, 00	Kep ala Bagi an Pem ban gun an Setd a Kab upat en Sido arjo
					2. Persenta se Permasal ahan pembang unan daerah yang ditindakla njudi	100 %	100 %	Rp 226. 487. 600, 00	100 %	Rp 232. 487. 600, 00	100 %	Rp 800. 000. 000, 00	100 %	Rp 850. 000. 000, 00	100 %	Rp 900. 000. 000, 00	100 %	Rp 1.00 0.00 0.00 0,00	100 %	Rp 1.00 0.00 0.00 0,00	Kep ala Bagi an Pem ban gun an Setd a Kab

		4.01 .03. 2.02 .01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya kebijakan terkait standarisasi penyusunan program dan kegiatan PD		Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun (SSH, ASB, HSPK)	1 Kebijakan	2 Kebijakan	3 Kebijakan		3 Kebijakan		3 Kebijakan		3 Kebijakan		3 Kebijakan		3 Kebijakan		Rp 433. 962. 000		Rp 523. 112. 000, 00		Rp 1.40 0.00 0.00 0,00		Rp 1.45 0.00 0.00 0,00		Rp 1.50 0.00 0.00 0,00		Rp 1.60 0.00 0.00 0,00		Rp 1.60 0.00 0.00 0,00	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Sidoarjo
					Terkenalnya usul standarisasi harga untuk penyusunan program dan		Persentase usul standarisasi harga PD yang memenuhi kelengkapan	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				100 %										Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	

				kegiatan PD		sesuai SOP																Setda Kabupaten Sidoarjo	
		4.01 .03. 2.02 .02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tersusunnya kebijakan terkait pengendalian pembangunan		Persentase rumusan kebijakan pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Rp 226.487.600	100 %	Rp 232.487.600,00	100 %	Rp 800.000.000,00	100 %	Rp 850.000.000,00	100 %	Rp 900.000.000,00	100 %	Rp 1.000.000,00	100 %	Rp 1.000.000,00	Keala Sub Bagian Pengendalian Program Setda Kabupaten Sidoarjo

				Pembangunan	strasi pembangunan daerah		strasi pembangunan daerah yang disusun (LKPJ dan Laporan Berkala TW1 - TW4)														dan Pelaporan Setda Kabupaten Sidoarjo	
					Terevaluasinya hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan PD sesuai dengan target		Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)	81,25%	100%		85%		87,50%		90%		92,50%		95%		95%	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Setda Kabupaten Sidoarjo

		4.01 .03. 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya indeks kualitas PBJ	Indeks Kualitas PBJ	level 3 pada 8 variabel	level 4 pada 1 variabel	Rp 3.87 6.14 6.87 9	level 4 pada 3 variabel	Rp 6.34 3.65 2.52 6	level 4 pada 5 variabel	Rp 6.97 8.01 7.77 9	level 4 pada 7 variabel	Rp 7.67 5.81 9.55 6	level 4 pada 9 variabel	Rp 8.44 3.40 1.51 2	level 5 pada 2 variabel	Rp 9.28 7.74 1.66 3	level 5 pada 2 variabel	Rp 9.28 7.74 1.66 3	Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .03. 2.03 .01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terfasilitasinya seluruh pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan melalui bagian pengadaan barang /jasa	1. Jumlah produk hukum bidang pengadaan barang jasa yang dirumuskan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	Rp 570. 753. 242	4 Kebijakan	Rp 3.58 5.44 8.96 0	2 Kebijakan	Rp 3.94 3.99 3.85 6	2 Kebijakan	Rp 4.33 8.39 3.24 2	2 Kebijakan	Rp 4.77 2.23 2.56 6	2 Kebijakan	Rp 5.24 9.45 5.82 2	2 Kebijakan	Rp 5.24 9.45 5.82 2	Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo

							2. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo
							3. Persentase jumlah pengadaan yang dilaksanakan dengan	90,21 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo

							metode kompetitif dan non kompetitif																
							4. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	88,30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo
							5. Presentase Paket Pengadaan yang diinventarisasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo

							6. Jumlah pelaksanaan riset dan analisa pasar barang/jasa yang dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo
							7. Jumlah laporan dokumen pengadaaan strategis	10 Paket	10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket	Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo

							8. Prosentase Paket Tender yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari OPD	100 %	100 %												Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	
							9. Presentase produk yang diproses melalui Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan usulan	100 %	100 %													Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo

						olaan kontrak sesuai dengan permintaan dari OPD																	
						11. Prosentasi Paket Tender yang dilakukan Evaluasi	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo
	4.01 .03. 2.03 .02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terfasilitasinya seluruh pengguna LPSE		1. Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	90 %	90 %	Rp 1.15 8.94 8.41 9	91 %	Rp 1.35 1.05 4.42 0	92 %	Rp 1.48 6.15 9.86 2	93 %	Rp 1.63 4.77 5.84 8	94 %	Rp 1.79 8.25 3.43 3	95 %	Rp 1.97 8.07 8.77 6	95 %	Rp 1.97 8.07 8.77 6		Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo

								2. Jumlah pembangan sistem informasi	2 Aplikasi	2 Fitur		2 Fitur		2 Fitur		2 Fitur		2 Fitur		2 Fitur		2 Fitur		2 Fitur		2 Fitur		2 Fitur		2 Fitur			Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--	---	--

								3. Prosentase pelayanan dan registrasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	100 %	100 %												Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

		4.01 .03. 2.03 .03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sidoarjo		Jumlah para pelaku pengadaan barang/jasa atau personil lainnya yang dibina	300 Orang	300 Orang	Rp 2.14 6.44 5.21 8	600 Orang	Rp 1.40 7.14 9.14 6	400 Orang	Rp 1.54 7.86 4.06 1	300 Orang	Rp 1.70 2.65 0.46 7	300 Orang	Rp 1.87 2.91 5.51 3	300 Orang	Rp 2.06 0.20 7.06 5	300 Orang	Rp 2.06 0.20 7.06 5	Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo
--	--	-----------------------------	--	--	---	--	--	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------------------

					Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa 100% dilaksanakan secara elektronik		Jumlah Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ) yang dibina.	3 Orang	3 Orang		8 Orang		15 Orang		20 Orang		25 Orang		30 Orang		30 Orang	Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo
					Meningkatkan kualitas kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa		1. Persentase pendampingan dan atau konsultasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo

							diproses																		
							2. Persentase Kebijakan Daerah yang dievaluasi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo

							3. Presen tase pengg unaan e- Procur ement Terhad ap Belanj a Penga daan	12,5 0%	NA		70 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bagi an PBJ Setd a Kab upat en Sido arjo
							4. Jumla h kebijak an daerah bidang penga daan barang jasa yang ditetap kan	12 Keb ijak an	12 Keb ijak an		20 Keb ijak an		20 Keb ijak an		20 Keb ijak an		20 Keb ijak an		20 Keb ijak an		20 Keb ijak an	Bagi an PBJ Setd a Kab upat en Sido arjo

4.01 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Menin gkatny a kualita s kebijak an dan koordinasi dibawah koordinasi Asiste n Admini strasi Umum	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintah an Daerah	NA	NA	Rp 59.4 47.8 71.7 93	70	Rp 56.9 66.6 73.5 73	72	Rp 92.2 14.8 04.9 92	75	Rp 97.9 42.3 00.4 92	77	Rp 106. 534. 395. 540	80	Rp 116. 141. 085. 095	80	Rp 136. 581. 463. 604	
			Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66 %	66 %	Rp 286. 768. 100	66 %	Rp 397. 550. 000	66 %	Rp 700. 000. 000	100 %	Rp 800. 000. 000	100 %	Rp 900. 000. 000	100 %	Rp 1.00 0.00 0.00 0	100 %	Rp 4.00 0.00 0.00 0	
			Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	20 %	50 %	Rp 190. 981. 460	75 %	Rp 104. 675. 000	77 %	Rp 225. 000. 000	78 %	Rp 250. 000. 000	80 %	Rp 275. 000. 000	100 %	Rp 300. 000. 000	100 %	Rp 1.35 0.00 0.00 0	
4.01 .01. 2.13	Penataan Organisasi	Menin gkatny a kualita s kebijak an daerah di bidang organi sasi	Indeks kualitas kebijakaa n daerah bidang Organisa si PD : Setda, Inspekt or at, BKD, BPKAD, BPPD,	NA	NA	Rp 583. 288. 100	70	Rp 1.13 6.05 0.00 0	72	Rp 1.87 5.00 0.00 0	75	Rp 2.10 0.00 0.00 0	77	Rp 2.32 0.00 0.00 0	80	Rp 2.55 0.00 0.00 0	80	Rp 10.4 95.0 00.0 00	Bagi an Org anis asi Setd a Kab upat en Sido arjo

					Setwan, Disperpu sarsip, Diskomin fo																
				Menin gkatny a kualita s koordi nasi di bidang organi sasi	1. Persenta se PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisas i	25 %	25 %	Rp 190. 981. 460	25 %	Rp 104. 675. 000	50 %	Rp 225. 000. 000	50 %	Rp 250. 000. 000	75 %	Rp 275. 000. 000	100 %	Rp 300. 000. 000	100 %	Rp 1.35 0.00 0.00 0	Bagi an Org anis asi Setd a Kab upat en Sido arjo
					2. Persenta se kinerja urusan yang tercapai di bidang organisas i	100 %	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %		Bagi an Org anis asi Setd a Kab upat en Sido arjo

				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1. Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima	NA	NA		30 %		40 %		50 %		60 %		70 %		70 %	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
					2. Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	NA	NA		30 %		40 %		50 %		60 %		70 %		70 %	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
				Meningkatnya kualitas SAKIP dan Reformasi	Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B	21 %	NA	Rp 224.640.480	40 %	Rp 543.461.600	55 %	Rp 600.000.000	70 %	Rp 625.000.000	85 %	Rp 650.000.000	100 %	Rp 700.000.000	100 %	Rp 3.155.000.000	Bagian Organisasi Setda Kabupaten

				Birokrasi (RB) Perangkat Daerah																	en Sidoarjo		
		4.01 .01. 2.13 .01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan Anjab		1. Persentase perangkat daerah yang SOTK dan Tusinya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	100 %	NA		Rp 145.875.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Rp 520.000.000	100 %	Rp 550.000.000	100 %	Rp 2.495.000.000	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo
							2. Persentase Unit Kerja yang Anjab dan ABKnya	100 %	NA			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %			Bagian Organisasi Setda Kabupaten	

						telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya															Sidoarjo	
		4.01 .01. 2.13 .02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan bidang ketatalaksanaan		1. Persentase PD yang menerapkan peta proses bisnis	NA	NA	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	70 %							Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
						2. Prosentase Unit Kerja yang berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan	78 %	NA	80 %	82 %	85 %	87 %	90 %	90 %								Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo
									Rp 150.645.000	Rp 465.350.000	Rp 700.000.000	Rp 800.000.000	Rp 900.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 4.000.000.000							

						n publik																		
4.01	.01.	2.13	.04	Monitoring Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan bidang pelayanan publik		1. Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima	14 %	NA	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	60 %		Rp 1.000.000.000	Rp 4.000.000.000					Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
							2. Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori	19 %	NA	30 %	30 %	40 %	50 %	60 %	60 %		Rp 286.768.100	Rp 397.550.000	Rp 700.000.000	Rp 800.000.000	Rp 900.000.000		Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	

						yang menerapan Budaya Kinerja															Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01.01.2.13.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah		Persentase PD yang telah melaporkan kinerja nya sesuai dengan Juknis dan tepat waktu	80 %	100 %	Rp 190.981.460	90 %	Rp 104.675.000	100 %	Rp 225.000.000	100 %	Rp 250.000.000	100 %	Rp 275.000.000	100 %	Rp 300.000.000	100 %	Rp 1.350.000.000	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya tahapan perencanaan		Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	5 Tahapan	5 Tahapan	Rp 55.600.000	5 Tahapan	Rp 3.256.000	5 Tahapan	Rp 8.600.000	5 Tahapan	Rp 10.700.000	5 Tahapan	Rp 12.800.000	5 Tahapan	Rp 65.400.000	5 Tahapan	Rp 76.930.000	Bagian Umum Setda Kabupaten

																					Sidoarjo
				Terlaksananya rekomendasi hasil evaluasi kinerja	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Rp 1.050.000	1 Rekomendasi	Rp 51.089.000	1 Rekomendasi	Rp 2.250.000	1 Rekomendasi	Rp 2.800.000	1 Rekomendasi	Rp 3.350.000	1 Rekomendasi	Rp 3.900.000	1 Rekomendasi		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 dokumen	8 dokumen	Rp 52.000.000	2 dokumen	Rp 550.000	2 dokumen	Rp 3.000.000	2 dokumen	Rp 3.500.000	2 dokumen	Rp 4.000.000	3 dokumen	Rp 55.000.000	3 dokumen	Rp 60.600.000		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.350.000	1 Dokumen	Rp 330.000	1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp 2.500.000	1 Dokumen	Rp 3.000.000	1 Dokumen	Rp 3.500.000	1 Dokumen	Rp 3.950.000		Bagian Umum Setda Kabupaten

					disusun																upat en Sido arjo
4.01 .01. 2.01 .03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 450. 000	1 Dokumen	Rp 198. 000	1 Dokumen	Rp 600. 000	1 Dokumen	Rp 700. 000	1 Dokumen	Rp 800. 000	1 Dokumen	Rp 900. 000	1 Dokumen	Rp 1.09 0.00 0	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01 .01. 2.01 .4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA		Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 900. 000	1 Dokumen	Rp 1.08 9.00 0	1 Dokumen	Rp 1.50 0.00 0	1 Dokumen	Rp 2.00 0.00 0	1 Dokumen	Rp 2.50 0.00 0	1 Dokumen	Rp 3.00 0.00 0	1 Dokumen	Rp 3.40 0.00 0	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01 .01. 2.01 .5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA		Jumlah dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 900. 000	1 Dokumen	Rp 1.08 9.00 0	1 Dokumen	Rp 1.50 0.00 0	1 Dokumen	Rp 2.00 0.00 0	1 Dokumen	Rp 2.50 0.00 0	1 Dokumen	Rp 3.00 0.00 0	1 Dokumen	Rp 3.40 0.00 0	Bagian Umum Setda Kab

					SKPD yang disusun																upat en Sidoarjo
4.01.01.2.01.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan kinerja PD		Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 900.000	2 Dokumen	Rp 50.924.000	2 Dokumen	Rp 2.000.000	2 Dokumen	Rp 2.500.000	2 Dokumen	Rp 3.000.000	2 Dokumen	Rp 3.500.000	2 Dokumen	Rp 3.950.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01.01.2.01.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Monev		Jumlah dokumen monev PD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 150.000	4 Dokumen	Rp 165.000	4 Dokumen	Rp 250.000	4 Dokumen	Rp 300.000	4 Dokumen	Rp 350.000	4 Dokumen	Rp 400.000	4 Dokumen	Rp 540.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasi anggaran PD		Persentase realisasi anggaran PD	80 %	80 %	Rp 25.206.461.327	80 %	Rp 26.204.509.595	80 %	Rp 33.257.500.000	80 %	Rp 36.608.300.000	80 %	Rp 40.309.200.000	80 %	Rp 44.360.200.000	80 %	Rp 48.796.420.000	Bagian Umum Setda

																						a Kab upat en Sido arjo	
		4.01 .01. 2.02 .01	Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN	Tersed ianya Gaji dan Tunjan gan ASN				12 Bul an	12 Bul an	Rp 25.2 00.3 35.1 39	12 Bul an	Rp 26.2 02.2 65.5 95	12 Bul an	Rp 33.2 50.0 00.0 00	12 Bul an	Rp 36.6 00.0 00.0 00	12 Bul an	Rp 40.3 00.0 00.0 00	12 Bul an	Rp 44.3 50.0 00.0 00	12 Bul an	Rp 48.7 85.1 00.0 00	Bagi an Um um Setd a Kab upat en Sido arjo
		4.01 .01. 2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semester an SKPD	Tersusunnya laporan Keuang gan Bulana n/Sem esteran PD yang tersusun			14 Dok ume n	14 Dok ume n	Rp 6.12 6.18 8	14 Dok ume n	Rp 2.24 4.00 0	14 Dok ume n	Rp 7.50 0.00 0	14 Dok ume n	Rp 8.30 0.00 0	14 Dok ume n	Rp 9.20 0.00 0	14 Dok ume n	Rp 10.2 00.0 00	14 Dok ume n	Rp 11.3 20.0 00	Bagi an Um um Setd a Kab upat en Sido arjo	

		4.01 .01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepua san Masya rakat (SKM)		Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at (SKM)	75	80	Rp 2.46 8.24 8.52 4	80,5	Rp 2.49 4.62 5.85 8	81	Rp 3.16 6.30 0.00 1	81,5	Rp 3.48 7.15 0.00 1	82	Rp 3.83 7.44 9.99 9	82,5	Rp 4.22 2.95 0.00 1	82,5	Rp 4.64 6.14 5.00 1	Bagi an Um um Setd a Kab upat en Sido arjo
		4.01 .01. 2.06 .01	Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik / Penerang an Bangunan Kantor	Tersed ianya Kompone n listrik		Jenis kompo nen listrik /pener angan yang tersedi a	19 Jeni s	19 Jeni s	Rp 112. 759. 691	16 Jeni s	Rp 48.9 98.9 50	16 Jeni s	Rp 138. 000. 000	16 Jeni s	Rp 152. 000. 000	16 Jeni s	Rp 167. 500. 000	16 Jeni s	Rp 184. 500. 000	16 Jeni s	Rp 203. 050. 000	Bagi an Um um Setd a Kab upat en Sido arjo
		4.01 .01. 2.06 .02	Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Tersed ianya peralat an dan perlen gkapa n kantor		Jenis peralat an dan perlen gkapa n kantor yang tersedi a	97 Jeni s	97 Jeni s	Rp 300. 421. 636	73 Jeni s	Rp 258. 341. 222	73 Jeni s	Rp 385. 000. 000	73 Jeni s	Rp 424. 000. 000	73 Jeni s	Rp 466. 500. 000	73 Jeni s	Rp 514. 000. 000	73 Jeni s	Rp 565. 500. 001	Bagi an Um um Setd a Kab upat en Sido arjo

		4.01 .01. 2.06 .03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	16 Jenis	16 Jenis	Rp 61.2 65.4 94	7 Jenis	Rp 423. 140. 850	7 Jenis	Rp 27.1 00.0 00	7 Jenis	Rp 29.8 50.0 00	7 Jenis	Rp 32.8 50.0 00	7 Jenis	Rp 36.2 00.0 00	7 Jenis	Rp 39.9 20.0 01	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.06 .04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya BBM		1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jenis logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1. 200 0 Liter	1. 200 0 Liter	Rp 712. 233. 528	1. 200 0 Liter	Rp 750. 000. 000	1. 200 0 Liter	Rp 685. 000. 000	1. 200 0 Liter	Rp 755. 000. 000	1. 200 0 Liter	Rp 831. 000. 000	1. 200 0 Liter	Rp 914. 200. 000	1. 200 0 Liter	Rp 1.00 5.71 9.99 9	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.06 .05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan		Jenis cetak dan penggandaan yang	2 Jenis	2 Jenis	Rp 5.90 0.00 0	2 Jenis	Rp 3.19 0.00 0	2 Jenis	Rp 7.50 0.00 0	2 Jenis	Rp 8.50 0.00 0	2 Jenis	Rp 9.50 0.00 0	2 Jenis	Rp 10.5 00.0 00	2 Jenis	Rp 11.6 50.0 00	Bagian Umum Setda Kab

						tersedia															upat en Sido arjo
4.01 .01. 2.06 .06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya buku bacaan peraturan perundangan dan koran		Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundangan dan koran yang tersedia	11 Jenis	11 Jenis	Rp 108. 105. 544	11 Jenis	Rp 90.2 59.4 00	11 Jenis	Rp 135. 000. 000	11 Jenis	Rp 150. 000. 000	11 Jenis	Rp 165. 100. 000	11 Jenis	Rp 181. 700. 000	11 Jenis	Rp 199. 970. 001	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01 .01. 2.06 .07		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya macam-macam bahan material		Jenis bahan/material yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Rp 366. 180. 990	1 Tahun	Rp 235. 695. 436	1 Tahun	Rp 772. 900. 000	1 Tahun	Rp 850. 200. 000	1 Tahun	Rp 935. 300. 000	1 Tahun	Rp 1.02 8.85 0.00 0	1 Tahun	Rp 1.13 1.83 5.00 0	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

		4.01 .01. 2.06 .08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan makanan		a. Jenis jamuan yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 3 Jenis b. 2000 Pax	a. 3 Jenis b. 2000 Pax	Rp 353.462.500	a. 3 Jenis b. 2000 Pax	Rp 275.000.000	a. 3 Jenis b. 2000 Pax	Rp 427.800.000	a. 3 Jenis b. 2000 Pax	Rp 470.600.000	a. 3 Jenis b. 2000 Pax	Rp 517.700.000	a. 3 Jenis b. 2000 Pax	Rp 569.500.000	a. 3 Jenis b. 2000 Pax	Rp 626.550.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.06 .09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya SPT yang dirindakanlanjuti		a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	a. 100% b. 1 Tahun	a. 100% b. 1 Tahun	Rp 447.919.141	a. 100% b. 1 Tahun	Rp 410.000.000	a. 100% b. 1 Tahun	Rp 588.000.000	a. 100% b. 1 Tahun	Rp 647.000.000	a. 100% b. 1 Tahun	Rp 712.000.000	a. 100% b. 1 Tahun	Rp 783.500.000	a. 100% b. 1 Tahun	Rp 861.950.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

						asi yang diselenggarakan																
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD		Jenis BMD yang diadakan	14 Jenis	14 Jenis	Rp 4.063.686.202	1 Jenis	Rp 398.610.276	14 Jenis	Rp 5.462.000	14 Jenis	Rp 2.509.000	14 Jenis	Rp 1.560.000	14 Jenis	Rp 616.000.000	14 Jenis	Rp 1.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	34 UNIT	NA	Rp -		Rp -	34 UNIT	Rp 4.000.000									Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/		Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 UNIT	5 Unit	Rp 3.250.000	1 UNIT	Rp 398.610.276		4 UNIT	Rp 2.000.000								Bagian Umum Setda

				al atau Lapangan	operasional		ional yang diadakan														Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.07 .05		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel		Jenis mebelur yang diadakan	1 TAHUN	NA	Rp -	Rp -	1 TAHUN	Rp 1.000.000		1 TAHUN	Rp 1.000.000		1 TAHUN	Rp 1.000.000		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.07 .06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung/kantor /rumah dinas/jabatan		Jenis peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	30 Unit	30 Unit	Rp 813.686.202	Rp -	30 Unit	Rp 462.000.000	30 Unit	30 Unit	Rp 509.000.000	30 Unit	30 Unit	Rp 560.000.000	Rp 616.000.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

		4.01 .01. 2.07 .07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedia aset tetap lainnya		Jenis aset tetap lainnya yang diadakan	10 Buah	NA	Rp -	10 Buah	Rp -									Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo		
		4.01 .01. 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeenuhnya jasa penunjang perkantoran		Persentase terpenuhnya jasa penunjang perkantoran	100 %	100 %	Rp 5.508.850.950	100 %	Rp 6.173.453.200	100 %	Rp 8.030.000.000	100 %	Rp 8.834.000.000	100 %	Rp 9.718.500.000	100 %	Rp 10.692.000.000	100 %	Rp 11.761.600.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.08 .01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya surat keluar masuk		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	200 00 surat	200 00 surat	Rp 9.707.750	300 00 surat	Rp 13.000.000	300 00 surat	Rp 10.000.000	300 00 surat	Rp 11.000.000	300 00 surat	Rp 12.500.000	300 00 surat	Rp 14.000.000	300 00 surat	Rp 15.500.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

		4.01 .01. 2.08 .02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening listrik, air, telepon dan internet		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	Rp 1.77 8.50 0.00 0	12 Bulan	Rp 1.94 9.00 0.00 0	12 Bulan	Rp 2.24 3.00 0.00 0	12 Bulan	Rp 2.46 8.00 0.00 0	12 Bulan	Rp 2.71 5.00 0.00 0	12 Bulan	Rp 2.98 7.00 0.00 0	12 Bulan	Rp 3.28 5.80 0.00 0	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.08 .03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik		Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	100 %	100 %	Rp 172. 000. 000	100 %	Rp 176. 000. 000	100 %	Rp 1.11 8.00 0.00 0	100 %	Rp 1.23 0.00 0.00 0	100 %	Rp 1.35 3.00 0.00 0	100 %	Rp 1.48 9.00 0.00 0	100 %	Rp 1.63 8.00 0.00 0	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.08 .04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	19 Orang	19 Orang	Rp 3.54 8.64 3.20 0	19 Orang	Rp 4.03 5.45 3.20 0	19 Orang	Rp 4.65 9.00 0.00 0	19 Orang	Rp 5.12 5.00 0.00 0	19 Orang	Rp 5.63 8.00 0.00 0	19 Orang	Rp 6.20 2.00 0.00 0	19 Orang	Rp 6.82 2.30 0.00 0	Bagian Umum Setda Kabupaten

																					Sidoarjo
				Tersedianya tenaga keamanan kantor		Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	8 Orang	8 Orang		8 Orang		8 Orang		8 Orang		8 Orang		8 Orang		8 Orang	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
				Terbayarnya pengeluaran keuangan		Jumlah pengeluaran dan barang yang terbayar	67 Orang	67 Orang		67 Orang		67 Orang		67 Orang		67 Orang		67 Orang		67 Orang	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
				Terbayarnya tenaga Non ASN		Jumlah tenaga non ASN yang	12 Orang	12 Orang		12 Orang		12 Orang		12 Orang		12 Orang		12 Orang		12 Orang	Bagian Umum Setda

						terbayar																Kabupaten Sidoarjo
4.01	.01.	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan		10 jenis	10 jenis	Rp 2.403.593.000	10 jenis	Rp 2.328.268.492	10 jenis	Rp 19.948.500.000	10 jenis	Rp 21.943.700.000	10 jenis	Rp 24.138.600.000	10 jenis	Rp 26.553.000.000	100 Unit	Rp 30.538.670.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01	.01.	2.09	.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Terpeliharaan kendaraan jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	Rp 180.000.000	16 Unit	Rp 150.000.000	16 Unit	Rp 279.000.000	16 Unit	Rp 307.000.000	16 Unit	Rp 338.000.000	16 Unit	Rp 372.000.000		Rp 409.300.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

					n Dinas Jabatan																																			
		4.01	.01.	2.09	.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 Unit	17 Unit		17 Unit	17 Unit	Rp 210.500.000	17 Unit	17 Unit																								Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
							Tersedia bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan	Jenis bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	200 Buah	200 Buah		200 Buah	200 Buah		200 Buah	200 Buah																							Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
											Rp 173.000.000		Rp 173.000.000				Rp 231.600.000									Rp 254.800.000											1.638.000,00			

				Lunas STNK Kendaraan dinas		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	17 Unit	17 Unit		17 Unit		17 Unit		17 Unit		17 Unit		17 Unit		17 Unit	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel	Jenis mebelur yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	Rp 20.000.000	3 Jenis	Rp 200.000.000	3 Jenis	Rp 24.200.000	3 Jenis	Rp 26.700.000	3 Jenis	Rp 29.400.000	3 Jenis	Rp 32.400.000	3 Jenis	Rp 35.740.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
4.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Jenis	15 Jenis	Rp 774.155.000	15 Jenis	Rp 490.785.000	15 Jenis	Rp 1.681.000.000	15 Jenis	Rp 1.849.100.000	15 Jenis	Rp 2.034.100.000	15 Jenis	Rp 2.237.600.000	15 Jenis	Rp 2.461.460.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	

		4.01 .01. 2.09 .07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya		Jenis aset tetap lainnya yang dipelihara		NA	Rp -	Rp -								Rp 100.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo			
		4.01 .01. 2.09 .08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya aset tak berwujud		Jenis aset tak berwujud yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	Rp 50.000.000	3 Jenis	Rp 75.000.000	3 Jenis	Rp 90.800.000	3 Jenis	Rp 99.900.000	3 Jenis	Rp 109.900.000	3 Jenis	Rp 120.900.000	3 Jenis	Rp 133.090.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.09 .09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung/kantor/kantor/ rumah dinas/jabatan		Jumlah gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/reh	4 Gedung	4 Gedung	Rp -	4 Gedung	Rp 1.239.482	4 Gedung	Rp 8.831.500.000	4 Gedung	Rp 9.714.700.000	4 Gedung	Rp 10.686.200.000	4 Gedung	Rp 11.754.900.000	4 Gedung	Rp 12.930.490.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

					abilitas i																	
		4.01 .01. 2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4 Gedung	4 Gedung	Rp 1.20 6.43 8.00 0	4 Gedung	Rp -	4 Gedung	Rp 8.83 1.50 0.00 0	4 Gedung	Rp 9.71 4.70 0.00 0	4 Gedung	Rp 10.6 86.2 00.0 00	4 Gedung	Rp 11.7 54.9 00.0 00	4 Gedung	Rp 12.9 30.4 90.0 00		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya ASN yang disiplin	Persentase ASN yang disiplin	100 %	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp 857. 000. 000	100 %	Rp 942. 900. 000	100 %	Rp 1.03 7.70 0.00 0	100 %	Rp 1.14 1.90 0.00 0	100 %	Rp 1.25 6.19 0.00 0		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

				Terlatihnya ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01.01.2.05.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya mesin absensi	Jumlah mesin absensi yang disediakan	2 Unit	2 Unit	Rp -	2 Unit	Rp -	2 Unit	Rp 37.000.000	2 Unit	Rp 40.700.000	2 Unit	Rp 44.900.000	2 Unit	Rp 49.500.000	2 Unit	Rp 54.500.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	189 Buah	189 Buah	Rp -	189 Buah	Rp -	189 Buah	Rp 133.100.000	189 Buah	Rp 146.500.000	189 Buah	Rp 161.200.000	189 Buah	Rp 177.400.000	189 Buah	Rp 195.240.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

		4.01 .01. 2.05 .03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terfasilitasi administrasi kepegawaian		a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	a. 189 Orang b. 189 Orang	a. 189 Orang b. 189 Orang	Rp -	a. 189 Orang b. 189 Orang	Rp -	a. 189 Orang b. 189 Orang	Rp 3.900.000	a. 189 Orang b. 189 Orang	Rp 4.300.000	a. 189 Orang b. 189 Orang	Rp 4.800.000	a. 189 Orang b. 189 Orang	Rp 5.300.000	a. 189 Orang b. 189 Orang	Rp 5.930.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.05 .05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah		Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah	5 Kali	5 Kali	Rp -	5 Kali	Rp -	5 Kali	Rp 2.900.000	5 Kali	Rp 3.200.000	5 Kali	Rp 3.600.000	5 Kali	Rp 4.000.000	5 Kali	Rp 4.500.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

				Daerah		h yang dilakukan																
4.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	50 Orang	50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp 165.800.000	50 Orang	Rp 182.400.000	50 Orang	Rp 200.700.000	50 Orang	Rp 220.800.000	50 Orang	Rp 242.980.000		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-	50 Orang	50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp 60.500.000	50 Orang	Rp 66.600.000	50 Orang	Rp 73.300.000	50 Orang	Rp 80.700.000	50 Orang	Rp 88.870.000		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

				undangan		undangan																
	4.01 .01. 2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	189 Orang	189 Orang	Rp -	189 Orang	Rp -	189 Orang	Rp 453. 800. 000	189 Orang	Rp 499. 200. 000	189 Orang	Rp 549. 200. 000	189 Orang	Rp 604. 200. 000	189 Orang	Rp 664. 720. 000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
	4.01 .01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teregristasi BMD SKPD		Persentase BMD SKPD yang telah	100 %	100 %	Rp 504. 930	100 %	Rp 418. 000	100 %	Rp 2.70 0.00 0	100 %	Rp 3.00 0.00 0	100 %	Rp 3.30 0.00 0	100 %	Rp 3.70 0.00 0	100 %	Rp 6.36 0.00 0	Bagian Umum Setda	

					teregistra si																Kab upat en Sido arjo	
					Terser tifikasi nya BMD SKPD	Persenta se BMD SKPD yang telah tersertifik asi	100 %	100 %	Rp 960. 000	100 %	Rp 205. 660. 000	100 %	Rp 1.30 0.00 0	100 %	Rp 1.50 0.00 0	100 %	Rp 1.70 0.00 0	100 %	Rp 1.90 0.00 0	100 %		Bagi an Um um Setd a Kab upat en Sido arjo
		4.01 .01. 2.03 .01	Penyusun an Perencan aan Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD	Tersus unnya lapora n RKBM D	Jumla h Lapora n RKBM D yang disusu n	2 Lap ora n	2 Lap ora n	Rp 504. 930	1 Lap ora n	Rp 418. 000	1 Lap ora n	Rp 2.70 0.00 0	1 Lap ora n	Rp 3.00 0.00 0	1 Lap ora n	Rp 3.30 0.00 0	1 Lap ora n	Rp 3.70 0.00 0	1 Lap ora n	Rp 4.17 0.00 0		Bagi an Um um Setd a Kab upat en Sido arjo

		4.01 .01. 2.03 .02		Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	Terinventarisasi aset		Persentase aset yang diinventarisasi	NA	NA	Rp -	100 %	Rp 205. 000. 000	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
		4.01 .01. 2.03 .05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekon BMD SKPD		Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	4 Laporan	4 laporan	Rp 960. 000	4 Laporan	Rp 660. 000	4 Laporan	Rp 1.30 0.00 0	4 Laporan	Rp 1.50 0.00 0	4 Laporan	Rp 1.70 0.00 0	4 Laporan	Rp 1.90 0.00 0	4 Laporan	Rp 2.19 0.00 0	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
					Tersusunnya laporan BMD SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD yang	4 Laporan	4 laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		Bagian Umum Setda

					disusun																Kabupaten Sidoarjo	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhi kebutuhan Tanggapan Pimpinan Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	90,25%	100%	Rp 11.644.904.938	100%	Rp 9.933.053.843	100%	12.122.383.936	100%	13.334.622.330	100%	14.668.084.563	100%	16.134.893.019	100%	Rp 17.748.382.321	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Sidoarjo
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhi kebutuhan Rumah Tangga Kepala	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang	90,25%	100%	Rp 9.301.605.817	100%	Rp 8.286.853.843	100%	10.043.000.000	100%	11.047.300.000	100%	12.152.030.000	100%	13.367.233.000	100%	Rp 14.703.956.300	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda

					Daerah		Dipenuhi															Kabupaten Sidoarjo	
		4.01 .01. 2.12 .02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpeenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	90,25%	100%	Rp 2.343.299.121	100%	Rp 1.646.200.000	100%	2.079.386	100%	2.287.320	100%	2.516.053	100%	2.767.669	100%	Rp 3.044.426.021	Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Sidoarjo

		4.01 .01. 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedia Admini strasi Keuan gan dan Opera sional Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h	Tersedia Admini strasi Keuanga n dan Operasio nal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bul an	12 Bul an	Rp 2.92 6.82 3.29 8	12 Bul an	Rp 2.89 6.44 7.93 5	12 Bul an	Rp 3.35 8.70 0.00 0	12 Bul an	Rp 3.69 4.80 0.00 0	12 Bul an	Rp 4.06 4.40 0.00 0	12 Bul an	Rp 4.47 1.00 0.00 0	12 Bul an	Rp 4.91 8.50 0.00 0	Bagi an Prot okol dan Ru mah Tan gga Setd a Kab upat en Sido arjo
		4.01 .01. 2.11 .01	Penyedia an Gaji dan Tunjanga n Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedia Gaji dan Tunjan gan Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h	Tersedia Gaji dan Tunjan gan Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h	12 Bul an	12 Bul an	Rp 173. 066. 143	12 Bul an	Rp 173. 066. 143	12 Bul an	Rp 209. 600. 000	12 Bul an	Rp 230. 600. 000	12 Bul an	Rp 253. 700. 000	12 Bul an	Rp 279. 100. 000	12 Bul an	Rp 307. 110. 000	Bagi an Um um Setd a Kab upat en Sido arjo

		4.01 .01. 2.11 .02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			24 Stee l	24 Stee l	Rp 220. 000. 000	24 Stee l	Rp 220. 000. 000	24 Stee l	Rp 266. 200. 000	24 Stee l	Rp 292. 900. 000	24 Stee l	Rp 322. 200. 000	24 Stee l	Rp 354. 500. 000	24 Stee l	Rp 390. 050. 000		Bagian Umum Setia Kabupaten Sidoarjo
--	--	-----------------------------	--	--	---	--	--	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	--	--------------------------------------

		4.01 .01. 2.11 .03		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perse ntase Pelaks anaan Medic al Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi			100 %	100 %	Rp 40.000.000	100 %	Rp 40.000.000	100 %	Rp 48.400.000	100 %	Rp 53.300.000	100 %	Rp 58.700.000	100 %	Rp 64.600.000	100 %	Rp 71.160.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.11 .04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersed ianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan			12 Bulan	12 Bulan	Rp 2.493.757.155	12 Bulan	Rp 2.463.381.792	12 Bulan	Rp 2.834.500.000	12 Bulan	Rp 3.118.000.000	12 Bulan	Rp 3.429.800.000	12 Bulan	Rp 3.772.800.000	12 Bulan	Rp 4.150.180.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

					Wakil Kepala Daerah																			
					Wakil Kepala Daerah																			
		4.01 .01. 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	80,00	80,00	Rp 4.646.028.144	81	Rp 4.995.319.774	82	Rp 4.222.571.055	83	Rp 4.644.828.160	84	Rp 5.109.310.977	85	Rp 5.624.242.074	85	Rp 6.182.266.281	85			Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Sidoarjo

		4.01 .01. 2.14 .01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya pelayanan Keprotokolan		IKM Fasilitasi Keprotokolan	80,0 0	80,0 0	Rp 2.89 6.36 4.51 4	81	Rp 2.99 9.02 3.77 4	82	Rp 3.69 1.78 8.06 2	83	Rp 4.06 0.96 6.86 8	84	Rp 4.46 7.06 3.55 5	85	Rp 4.91 7.76 9.91 0	85	Rp 5.40 5.14 6.90 1	Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Sidoarjo
		4.01 .01. 2.14 .02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya pelayanan Komunikasi Pimpinan		IKM Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	NA	80,0 0	Rp 1.37 8.65 8.58 5	81	Rp 1.23 0.00 0.00 0	82	Rp 81.8 66.8 88	83	Rp 90.0 53.5 77	84	Rp 99.0 58.9 35	85	Rp 108. 964. 828	85	Rp 119. 861. 311	Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Sidoarjo

		4.01 .01. 2.14 .03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan			Persentase Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan	NA	100 %	Rp 371.005.045	100 %	Rp 766.296.000	100 %	Rp 448.916.105	100 %	Rp 493.807.715	100 %	Rp 543.188.487	100 %	Rp 597.507.336	100 %	Rp 657.258.069	Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Sidoarjo
--	--	-----------------------------	--	---------------------------------	---	--	--	--	----	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	---

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Status Kinerja LPPD		ST (2018 3,549)	ST (4,00)	ST (4,21)	ST (4,3)	ST (4,4)	ST (4,45)	ST (4,5)	ST (4,5)
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		A- (4,27)	A- 4,3	A- 4,32	A- 4,35	A- 4,4	A- 4,45	A- 4,49	A- 4,49
3	Nilai SAKIP		BB (78,23)	A (80,1)	A (80,5)	A (81)	A (81,5)	A (85)	AA (90,01)	AA (90,01)
		1. Indeks Kualitas Kebijakan	NA	NA	70	72	75	77	80	80
		2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	20%	50%	75%	77%	78%	80%	100%	100%
		3. Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	66%	66%	66%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Dengan penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ini, diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para aparatur sipil negara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu diharapkan para aparatur sipil negara, khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana yang telah tercantum pada dokumen ini.

Akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis. Renstra ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi.

Sidoarjo, 17 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. ACHMAD ZAINI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640131 199103 1 002